

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Kebijakan hukuman mati yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia terhadap tersangka narkoba yang sebagian merupakan warga negara asing akhir ini menerima banyak pro dan kontra atas eksekusi mati yang akan dilaksanakan oleh Indonesia. Beberapa permohonan keringanan hukuman telah disampaikan beberapa negara yang bersangkutan dengan hukuman mati tersebut. Di antaranya adalah Australia yang dimana melakukan komunikasi serta mengirimkan beberapa pernyataan permintaan keringanan hukuman untuk warga negaranya.

Namun, permintaan keringanan hukuman tersebut tidak dihiraukan oleh pemerintah Indonesia sendiri melainkan pemerintah Indonesia akan tetap melakukan eksekusi mati terhadap warga negara Australia tersebut. Hubungan kerjasama antara Australia cukup baik. Hubungan kerjasama yang dijalin antara kedua negara tersebut antara lain kerjasama perdagangan ekspor dan impor, kerjasama politik, dan juga kerjasama di bidang pariwisata. Dalam beberapa pernyataan yang disampaikan oleh pemerintah Australia di beberapa berita bahwa pemerintah Australia akan berusaha sebisa mungkin untuk membebaskan warga negaranya dari hukuman mati yang

Dari beberapa uraian di atas, menarik untuk membahas mengenai hubungan diplomatik dan hubungan kerjasama yang telah dijalin cukup baik antara Indonesia dan Australia akan menerima dampak atas kebijakan yang telah dibuat Indonesia terhadap warga negara Australia tersebut. Karena seperti yang kita ketahui bahwa hubungan kerja sama Indonesia dengan Australia selama ini cukup baik dan saling menguntungkan antara kedua negara. Dalam makalah ini akan membahas mengenai pengaruh yang akan timbul pada politik luar negeri Australia terhadap Indonesia. Selain itu, kita juga dapat membahas mengenai kerugian ataupun keuntungan yang akan diterima oleh Indonesia apabila sampai dibekukannya hubungan diplomatik antara Australia dan Indonesia oleh pemerintah Australia.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjalin hubungan diplomatic dengan berbagai negara. Salah satu negara yang menjalin hubungan diplomatic dengan Indonesia sudah cukup lama yakni negara tetangga yaitu Australia. Negara Australia merupakan salah satu negara yang menjalin kerjasama yang cukup banyak di berbagai bidang dengan Indonesia. Hubungan diplomatic Indonesia dan Australia terkadang memiliki pasang surut dalam hubungan kerjasamanya dikarenakan beberapa permasalahan yang timbul di antara kedua negara.

Pada akhir-akhir ini, Indonesia dan beberapa negara mendapat sorotan oleh masyarakat internasional dikarenakan eksekusi hukuman mati yang ditetapkan oleh

Indonesia terhadap beberapa warga negara asing yang salah satunya warga negara Australia. Hukuman eksekusi mati yang ditetapkan oleh Indonesia merupakan hukuman terhadap para terpidana dan tersangka narkoba. Keputusan hukuman mati yang diterapkan pemerintah Indonesia merupakan ketegasan Indonesia terhadap penegakan hukum di Indonesia itu sendiri. Kasus penyelundupan narkoba tersebut berawal dari kasus Bali Nine yang dimana dilakukan oleh sembilan orang yang menyelundupkan heroin ke Indonesia.

Kedelapan pria dan satu wanita itu ditangkap pada April 2005 di bandara dan hotel di Bali setelah adanya informasi dari Polisi Federal Australia. Mereka berusaha menyelundupkan 8,3kg heroin ke Australia. Pada 2006, pengadilan memutuskan bahwa Andrew Chan dan Myuran Sukumaran telah merekrut ketujuh orang lainnya dan membayar biaya mereka. Keduanya dihukum mati sedangkan tujuh orang lainnya dihukum antara 20 tahun dan seumur hidup. Chan dan Sukumaran telah berulang kali mengajukan upaya hukum untuk membatalkan hukuman mati itu dan mengatakan mereka telah berubah. Chan mengajar kelas Injil dan memasak di penjara sedangkan Sukumaran adalah seorang seniman.<sup>1</sup>

Eksekusi mati yang melibatkan beberapa warga negara asing ini memberikan banyak kontra dari negara-negara yang bersangkutan. Setiap pemerintah negara-negara yang bersangkutan telah melakukan beberapa permohonan serta protes untuk meringankan hukuman mati yang dijatuhkan oleh warga negaranya. Para diplomat

---

<sup>1</sup> *Dua Terpidana Bali Nine Tiba di Cilacap*,  
[http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita\\_indonesia/2015/03/150304\\_bali\\_nine\\_pindah\\_nusakamban](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2015/03/150304_bali_nine_pindah_nusakamban)

masing-masing negara juga telah melakukan beberapa usaha untuk dapat melobi pemerintah Indonesia agar dapat memberikan keringanan hukuman terhadap warga negaranya. Namun, beberapa permohonan tersebut tidak direspon oleh pemerintah Indonesia dan tetap menjalankan hukuman mati terhadap tersangka narkoba tersebut.

Kejaksaan Agung menyatakan enam terpidana mati kasus narkoba akan dieksekusi secara serentak pada 18 Januari 2015 di Pulau Nusakambangan, Cilacap dan Boyolali. Keenam terpidana mati tersebut, yakni, Namaona Denis (48) Warga Negara Malawi, Marco Archer Cardoso Mareira (53) Warga Negara Brazil, Daniel Enemua (38) Warga Negara Nigeria, Ang Kim Soei (62) tidak jelas kewarganegaraannya, Tran Thi Bich Hanh (37) Warga Negara Vietnam dan Rani Andriani atau Melisa Aprilia. Warga Negara Indonesia.<sup>2</sup>

Dari data tersebut kedua warga negara Australia belum dieksekusi oleh pemerintah Indonesia beserta beberapa terpidana lainnya. Eksekusi mati yang akan dilakukan Indonesia selanjutnya merupakan eksekusi gelombang kedua. Para terpidana yang termasuk dalam gelombang kedua salah satunya warga negara Australia mendapatkan keringanan perpanjangan waktu untuk melakukan pembelaan atau pun permintaan keringanan akan hukuman yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Perwakilan dari Australia sendiri telah melakukan komunikasi dengan pemerintah Indonesia untuk dapat mendapatkan keringanan hukuman terhadap warga

---

<sup>2</sup> Bilal Ramadhan, *Eksekusi Hukuman Mati Serentak Dilakukan Pada 18 Januari 2015*, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/01/15/ni7ykw-eksekusi-hukuman-mati-serentak-dilakukan-pada-18-januari-2015> diakses pada 12 April 2015 pukul 23:17 WIB

negaranya. Bahkan, pemerintah Australia melakukan tindakan sendiri yang dimana langsung melakukan komunikasi dengan pemerintah Indonesia agar warga negaranya dapat mendapatkan keringanan hukuman.

Pemerintah Australia telah melakukan protes kepada pemerintah Indonesia atas pelaksanaan hukuman mati. Lobi antara pejabat tinggi pun telah dilakukan. Semakin mendekati pelaksanaan hukuman mati, pemerintah Australia melakukan berbagai tindakan. Salah satunya pernyataan yang disampaikan Menteri Luar Negeri Julia Bishop yang bernada ancaman. Ia mengkhawatirkan apabila Indonesia melaksanakan hukuman mati terhadap dua warganya, warga Australia tidak akan lagi melancong ke Indonesia. Di samping itu, tindakan tidak terpuji pun dilakukan pemerintah Australia yang diduga meminta Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki-moon, untuk mengecam pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, bahkan Ban Ki-moon menyampaikan agar Indonesia membatalkan pelaksanaan hukuman mati. Kecaman dan permintaan Ban Ki-moon sungguh disayangkan karena ia cenderung telah melakukan intervensi dan membela negara maju di PBB terhadap negara berkembang.<sup>3</sup>

Selain usaha tersebut, beberapa usaha juga telah dilakukan oleh pemerintah Australia untuk berusaha dalam menghindarkan hukuman mati bagi warga negaranya di Indonesia. Penawaran yang diberikan kepada Indonesia oleh pemerintah Australia adalah pertukaran tiga orang terpidana Indonesia yang tertangkap di Australia dengan

---

<sup>3</sup> Hikmahanto Juwana Guru Besar Hukum Internasional UI, *Abaikan Ancaman Australia*, <http://www.mediaindonesia.com/mipagi/read/8427/Abaikan-Ancaman-Australia/2015/02/17>

kedua warga negaranya yang terancam hukuman mati. Kemudian, Australia juga mengungkit akan bantuan yang telah diberikan terhadap Indonesia paska terjadinya tsunami di Aceh dengan maksud agar Indonesia dapat mempertimbangkan bantuan tersebut.

Dari beberapa pernyataan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Australia tersebut, sikap pemerintah Australia terlihat berubah dari waktu ke waktu menjelang dieksekusinya kedua warga negara Australia tersebut. Hal tersebut tercerminkan dari perilaku pemerintah Australia yang melobi pemerintah Indonesia secara pribadi sampai dengan mengeluarkan beberapa pernyataan yang bernada ancaman terhadap Indonesia. Hal tersebut memperlihatkan bahwa Australia bersifat agresif dalam menyelamatkan kedua warga negaranya tersebut dari eksekusi hukuman mati di Indonesia.

Namun, pemerintah Indonesia sendiri tetap pada hukuman mati tersebut dan tidak mengabaikan beberapa penawaran yang telah dilakukan oleh Australia. Kemudian mengenai bantuan yang telah diberikan terhadap Indonesia paska tsunami tersebut, masyarakat Indonesia membuat suatu gerakan yaitu coin for Australia yang dimana bermaksud untuk melakukan sindiran terhadap pemerintah Australia yang telah mengungkit dana bantuan yang telah diberikan oleh Indonesia paska tsunami.

Beberapa pendapat dari masyarakat Indonesia juga mendukung akan dilaksanakannya eksekusi mati gelombang kedua tersebut. Pendapat tersebut didasari bahwa pemerintah Indonesia harus tegas dalam menegakkan hukum di Indonesia analai Indonesia merupakan salah satu negara yang menentang keras akan kejahatan

narkoba yang sedang beredar pesat di Indonesia saat ini. Pemerintah Indonesia Joko Widodo juga harus tegas dalam menegakkan hukum agar Indonesia tidak direndahkan kedaulatannya di mata Internasional khususnya dalam masalah penegakan hukum di Indonesia.

Dari penolakan grasi kedua terpidana mati warga negara Australia tersebut serta penolakan permintaan keringanan hukum tersebut, Indonesia menerima beberapa ancaman yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia. Ancaman tersebut berupa konsekuensi apabila eksekusi terhadap warga negara Australia tersebut tetap dilaksanakan. Pemerintah Indonesia harus siap akan konsekuensi yang akan muncul setelah melakukan eksekusi mati tersebut. Bentuk ancaman tersebut merupakan suatu tindakan yang kemungkinan akan dilakukan pemerintah Australia terhadap Indonesia.

Dari beberapa pernyataan kementerian luar negeri Australia dan juga pemerintah Australia itu sendiri, menimbulkan beberapa perdebatan serta pendapat masyarakat mengenai tindakan yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia pun dihadapkan oleh beberapa dilema dalam menentukan kebijakan hukuma mati tersebut. Pemerintah Indonesia harus memikirkan apakah implikasi atau dampak yang akan timbul dalam hubungan diplomatic dan juga hubungan kerjasamanya dengan Australia akibat eksekusi mati warga Australia tersebut. Selain itu, pemerintah Indonesia juga dituntut harus tegas dalam menegakkan hukum di Indonesia.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari beberapa penjelasan akan permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia dan Australia tersebut serta kemungkinan tindakan yang akan dilakukan Australia menimbulkan pertanyaan:

*Mengapa kebijakan hukuman mati warga negara Australia di Indonesia berpengaruh pada sikap Australia terhadap Indonesia?*

### **D. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah :

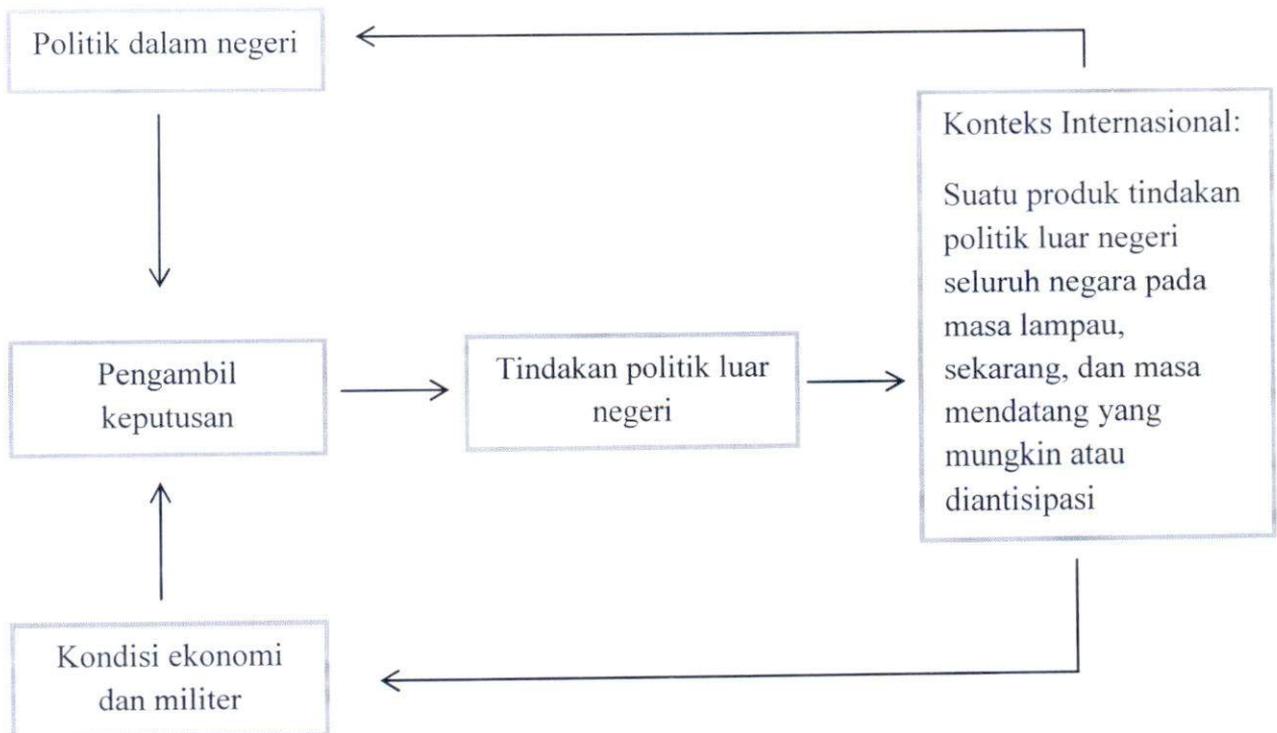
1. Penulisan makalah ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tambahan bagi yang membutuhkan dan bagi mahasiswa hubungan internasional khususnya.
2. Untuk mengetahui apa saja alasan-alasan dan upaya yang dilakukan Australia dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya terhadap Indonesia.
3. Untuk menerapkan teori yang dipelajari di bangku kuliah, serta untuk membantu menjawab rumusan masalah yang ada dan untuk membuktikan hipotesa-hipotesa yang telah dibuat.
4. Untuk memenuhi gelar sarjana S-1 pada program studi hubungan internasional fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Muhammadiyah

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Kebijakan Luar Negeri

Tindakan politik luar negeri tertentu mungkin bisa dipandang sebagai akibat dari tiga konsederasi yang mempengaruhi para pengambil keputusan politik luar negeri. Pertama, kondisi politik dalam negeri, kedua ; kedua, kondisi ekonomi dan militer ; ketiga, konteks internasional, yaitu posisi khusus suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain dalam sistem itu.

Gambar 1 : Bagan proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri



## Kontek Internasional

Secara tradisional para analisis telah menekankan bahwa sifat sistem internasional dan hubungan antara negara dengan kondisi-kondisi dalam sistem itu, menentukan bagaimana negara itu akan berperilaku. Kautilya, membahas suatu teori tentang perilaku negara yang sebagian didasarkan atas geografis dengan membayangkan :

Suatu lingkaran (yang terdiri atas) negara-negara yang membentuk sejenis sistem tata surya politik, dan cenderung saling bergravitasi sebagai sahabat atau bertabrakan sebagai musuh sesuai dengan posisi masing-masing dalam lingkaran tersebut. Jadi, negara-negara yang saling berbatasan, dan karena itu sesuai dengan sifatnya akan mempunyai banyak sekali titik gesek, harus dianggap musuh alami.

Ada tiga elemen penting dalam membahas dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara, yaitu geografis, ekonomi, dan politis. Lingkungan internasional setiap negara terdiri atas lokasi yang didudukinya, dalam kaitannya dengan negara-negara lain dalam sistem itu, dan juga hubungan-hubungan ekonomi dan politik antarnegara itu dengan negara lain.

## Pengambil Keputusan

Rosenau menyebut peran kepribadian dan perilaku individual dalam politik luar negeri sebagai “variable idiosinkretik” karena apa yang dilakukan individu itu dalam proses politik luar negeri tidak dapat diramalkan. Ketika pengambil keputusan itu membentuk lingkungannya, pada saat itu juga pula ia dibentuk oleh lingkungan

itu. Lingkungannya adalah sistem internasional, dan proses sosial dan politik dalam negeri yang merintang dan menentukan batas-batas aktivitasnya.

### Politik Dalam Negeri

Banyak analisis politik internasional berargumentasi bahwa konsekuensi-konsekuensi yang mempersatukan dari krisis eksternal sering menyebabkan para pengambil keputusan yang dihadapkan oleh instabilitas dalam negeri, menjadi agresif di luar negeri. Pengambilan keputusan luar negeri memang berusaha untuk membina dukungan dalam negeri terhadap rezim mereka untuk seluruh kebijakan mereka, dan bidang politik luar negeri mewakili suatu bidang di mana dukungan nyata dapat diperoleh. Walaupun keterbukaan suatu sistem politik atau tingkat stabilitas dalam negeri yang dialami oleh sistem itu, bisa membentuk aspek-aspek politik luar negeri tertentu, faktor-faktor lain juga bisa bekerja di dalamnya, seperti kepribadian pengambil keputusan atau struktur konteks internasional.

### Kondisi Ekonomi dan Politik

Kemampuan ekonomi dan militer tidak memberikan keuntungan yang mutlak bagi beberapa negara dalam berurusan dengan negara lain, kami memang menyatakan bahwa kondisi-kondisi ekonomi dan militer memainkan peran penting dalam proses penyusunan politik luar negeri, dengan memberikan dukungan dan tuntutan kepada pengambil keputusan politik luar negeri. Lippman mengungkapkan gagasan itu ketika ia berkata bahwa komitmen suatu negara harus diimbangi oleh kemampuannya.

Pernyataan ini menyiratkan bahwa suatu negara harus memiliki kemampuan dan kesediaan untuk menciptakan kemampuan yang diperlakukan untuk menopang politik luar negerinya.<sup>4</sup>

Beberapa definisi sikap para ahli :

- L. I Thurstone (1946)

Sikap sebagai tingkatan kecenderungan yang bersifat positif atau negatif yang berhubungan dengan objek psikologi (simbol, kata-kata, slogan, orang, lembaga, ide, dan sebagainya).

- Zimbardo dan Ebessen

Sikap adalah suatu predisposisi (keadaan mudah terpengaruh) terhadap seseorang, ide/objek yang berisi komponen-komponen kognitif, afektif, dan behavior.

- John H. Harvey dan William P. Smith

Kesiapan merespon secara konsisten dalam bentuk positif atau negatif terhadap objek atau situasi.<sup>5</sup>

## 2. Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional merupakan yang paling populer dalam analisa hubungan internasional, baik untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan maupun menganjurkan perilaku internasional. Analisa kepentingan nasional

---

<sup>4</sup> Copllin, William D. Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis, (1992, Bandung : Sinar Baru) Hal.30 dan Hal.165

<sup>5</sup> Rahayu Ginintasasi, *Sikap*, [www.file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR. PSIKOLOGI/195009011981032-](http://www.file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PSIKOLOGI/195009011981032-)

digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian suatu negara atas negara lain. Arti minimum yang inheren di dalam konsep kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup (survival). Dalam pandangan Morgenthau, kemampuan minimum negara bangsa adalah melindungi identitas fisik, politik, dan kulturalnya dari gangguan negara bangsa lainnya. Menurut Morgenthau, dari tujuan-tujuan umum ini para pemimpin suatu negara bisa menurunkan kebijaksanaan-kebijaksanaan spesifik terhadap negara lain, baik yang bersifat kerjasama maupun konflik.<sup>6</sup>

#### NATIONAL INTEREST,

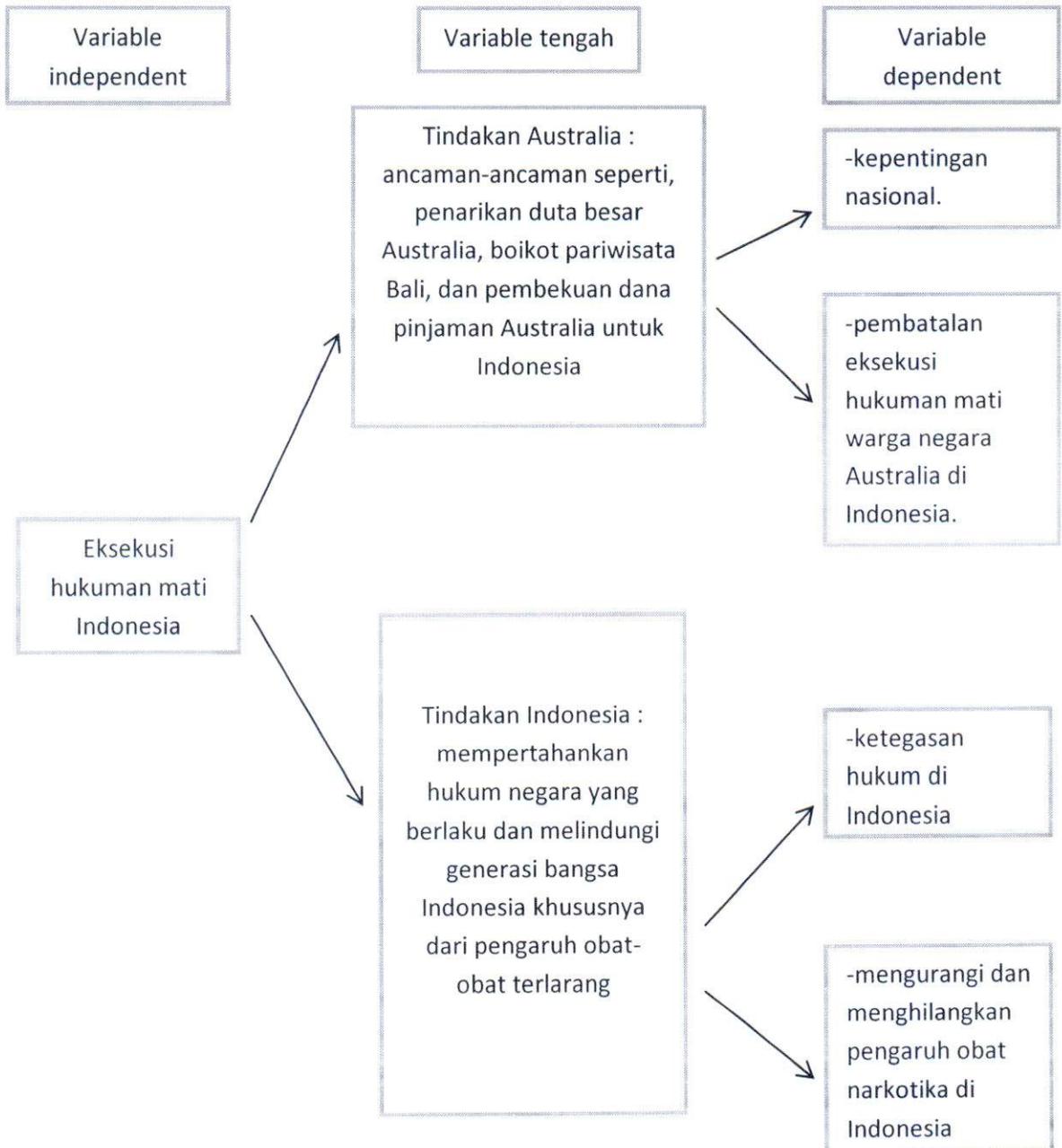
“ the fundamental objective and ultimate determinant that guides the decision makers of a state in making foreign policy. These include self-preservation, independence, territorial integrity, military security, and economic well-being. Because no single “interest” dominates the policymaking functions of a government, the concept might more accurately be referred to, in the plural, as national interest. The key problem of foreign policy making and diplomacy is that of translating the relatively vague and general interest of a nation concrete, precise objective and means. Although decision makers must deal with many variables in the international milieu, the concept of national interest usually remains the most constant factor and serves us a guidepost for decision makers in the policy. “<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> MAS'OED, Mohtar. Ilmu hubungan internasional : Disiplin dan metodologi, (1990, Jakarta : LP3ES) Hal. 139-141

<sup>7</sup> JACK C. PLANO, ROY OLTON. The International Relation Dictionary, (1969, New York : HOLT, REINHART and WINSTON, INC.) Hal. 128 dan Hal.129

## Kerangka Berfikir ( Variabelisasi )



## **F. Hipotesa**

Dari pembahasan yang ada , kemudian didukung oleh kerangka teoritik yang telah diterapkan, maka dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa :

1. Pengambilan keputusan mengenai tindakan Australia terhadap Indonesia juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti isu politik dalam negerinya yang dimana akan dilaksanakannya pemilu dan juga sikap Tony Abbot yang ingin menunjukkan rasa nasionalisme yang tinggi terhadap masyarakatnya.
2. Tindakan dan pernyataan-pernyataan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia merupakan strategi politik Australia untuk berusaha menyelamatkan warga negaranya yang dijatuhkan hukuman mati di Indonesia.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode non statistic, yaitu metode kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian dilaporkan apa adanya, selanjutnya dikumpulkan dipilahkan, dikategorisasi, diinterpretasi, dipaparkan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran fakta yang ada dan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

Data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu data yang bersifat teoritis digunakan sebagai landasan prespektif untuk mendeteksi masalah, dan data yang bersifat deskriptif untuk mendukung dan memperkuat serta menjelaskan permasalahan yang ada mengenai kasus yang diteliti, yaitu pengaruh

hukuman mati warga negara Australia di Indonesia pada sikap Australia terhadap Indonesia (Indonesia – Australia).

## **H. Jangkauan Penelitian**

Untuk membatasi masalah yang akan dijelaskan, jangkauan penelitian mengenai implikasi hukuman mati warga negara asing terhadap hubungan diplomatic Indonesia (Indonesia – Australia), hanya membahas mengenai sebab dan akibat dari kebijakan luar negeri Australia. Pada masa pemerintahan Tonny Abott dan presiden Joko Widodo pada tahun 2014 – 2015.

## **I. Sistematika Penulisan**

Bab 1 berisi mengenai pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kerangka teoritik, hipotesa, metodologi penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 berisi tentang politik luar negeri Australia terhadap Indonesia.

Bab 3 berisi mengenai tindakan – tindakan ancaman yang dilakukan Australia terkait dengan eksekusi mati terhadap warga negara Australia di Indonesia.

Bab 4 berisi mengenai sikap Australia terhadap Indonesia terkait dilaksanakannya eksekusi hukuman mati.

Bab 5 berisi tentang hasil yang telah disimpulkan dari pembahasan pada bab –